



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DI PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah maka perlu ada pedoman penyusunan peta proses bisnis di Pemerintah Kota Bima dalam rangka membangun tatalaksana penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bima, belum terdapat peta proses bisnis bagi unit organisasi dalam

implementasi program dan kegiatan secara lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI PEMERINTAH KOTA BIMA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah;
8. Daerah adalah Kota Bima.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.

## BAB II

### PRINSIP –PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. definitif, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus mempunyai penerima hasil proses;
- d. nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yaitu suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yaitu suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yaitu mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana;
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan agar setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah dalam mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

#### Pasal 4

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

#### BAB IV

### PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Daerah

##### Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Djangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada peta proses bisnis tingkat daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Perangkat Daerah

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur.

##### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan

dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan dikoordinasikan oleh sekretaris masing masing Perangkat Daerah.
- (5) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (6) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Rumah Sakit Daerah dikoordinasikan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.
- (7) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Bagian Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi Ketatalaksanaan;

## BAB V

### TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. tahap persiapan dan perencanaan;
  - b. tahap pengembangan;
  - c. tahap penerapan;
  - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan sebagai berikut:
  - a. Level 0 : Visi dan Misi;
  - b. Level 1 : Sasaran Daerah;
  - c. Level 2 : Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  - d. Level 3 : Program;
  - e. Level 4 : Aktivitas/kegiatan.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah menggunakan level 0 dan level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja menggunakan level 2 sampai dengan level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e.

- (5) Hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan menggunakan level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambar peta sebagai berikut:
- a. peta proses;
  - b. peta subproses;
  - c. peta hubungan;
  - d. peta lintas fungsi.
- (6) Rincian tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rincian mengenai level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian gambar peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan Peta Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

#### Pasal 10

Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Bima.



Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 21 Mei 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 657



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA  
PROSES BISNIS DI  
PEMERINTAH KOTA BIMA.

RINCIAN TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam pemerintah daerah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di tingkat Daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1.1. Pengumpulan informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapat melalui proses wawancara langsung ke penanggungjawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggungjawab proses. Perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses. Serta alat ukur yang bisa

digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis adalah informasi yang terkait dengan *supplier, input, proses, output* dan *customer*.

Teknik analisa terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- b. Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c. Pemodelan proses: pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

## 1.2. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan proses bisnis antara lain :

- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim reformasi birokrasi internal (RBI) masing-masing tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

## 2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representative, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0 sampai dengan level 4) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas fungsi.

### 2.1 Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan

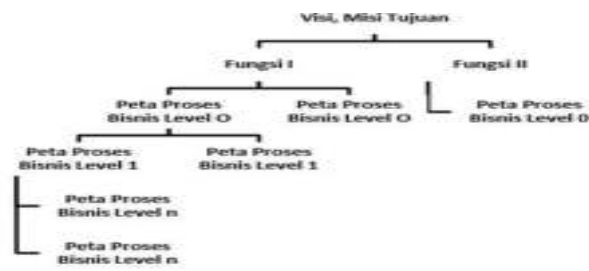
Peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi dan sasaran yang kemudian diturunkan dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Tahapan untuk penyusunan Peta Proses Bisnis di dalam Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan sasaran.
- b. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi serta sasaran.
- c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat

digambarkan sebagai berikut ini :



Gambar 1

Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta Proses Bisnis yang dimiliki Tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0 sampai dengan peta proses bisnis level 4, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi dan misi yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a). proses inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal tingkat Daerah;
- berpengaruh langsung terhadap keberhasilan tingkat Daerah dalam mencapai visi, dan misi;

- memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

b) proses pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

c) proses lainnya

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2  
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai sasaran Tingkat Daerah.



Gambar 3  
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level 2

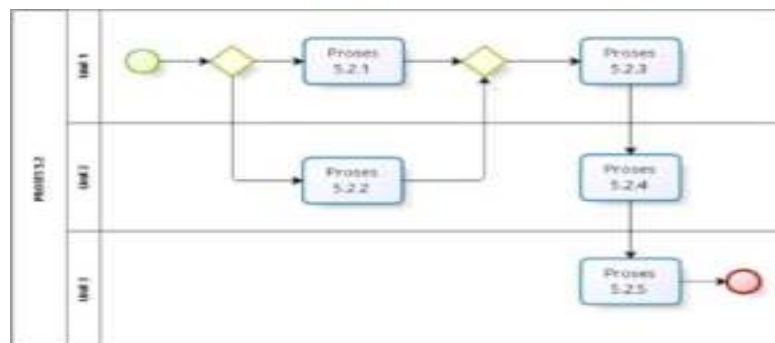
merupakan penjabaran dari sasaran Tingkat Daerah yang dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Level 3

merupakan penjabaran dari program Tingkat Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada rencana strategis.

e. Level 4

merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 3.



Gambar 4  
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2.2 Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan sasaran Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

a. Peta Proses

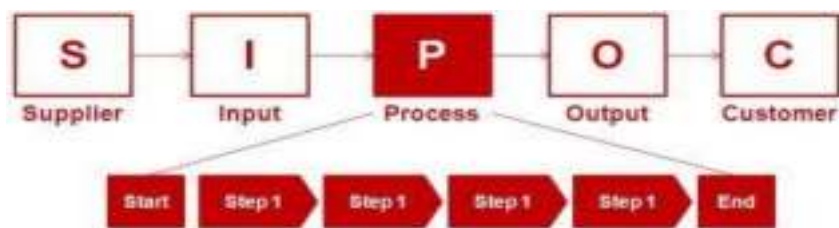
1) Identifikasi peta proses:

- a) untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;

- b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya

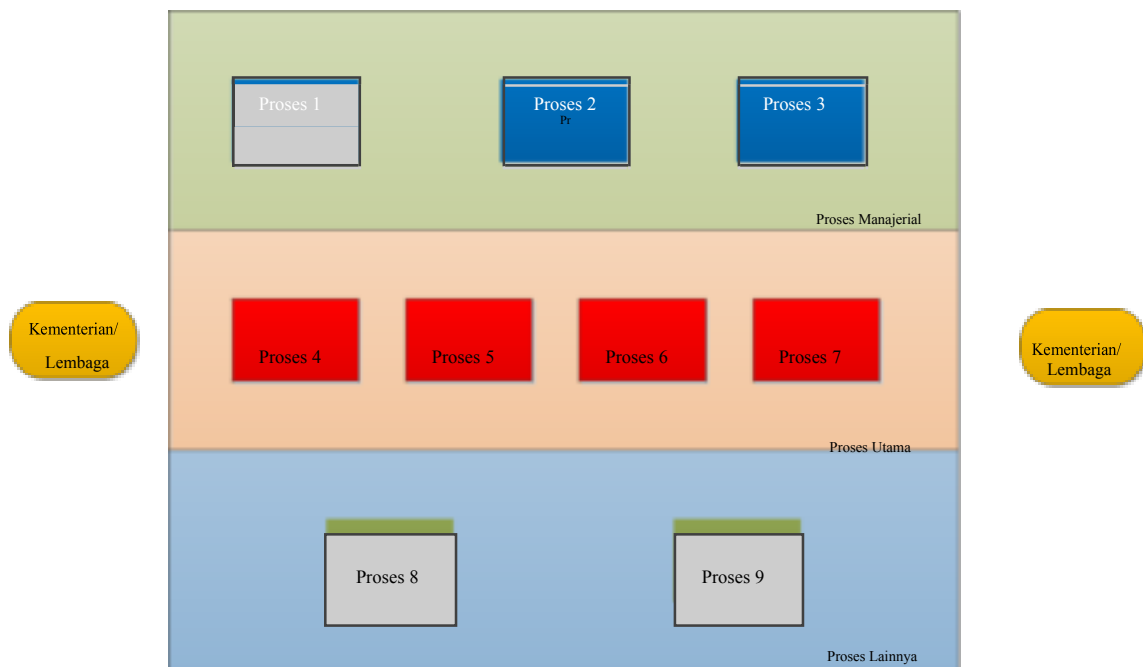
adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;

- c) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
  - d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output Customer* (SiPoC).





#### 4) Finalisasi peta proses



Gambar 5

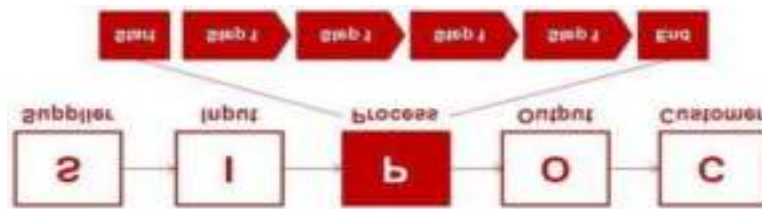
Contoh Peta Proses Bisnis

#### b. Peta Sub-Proses

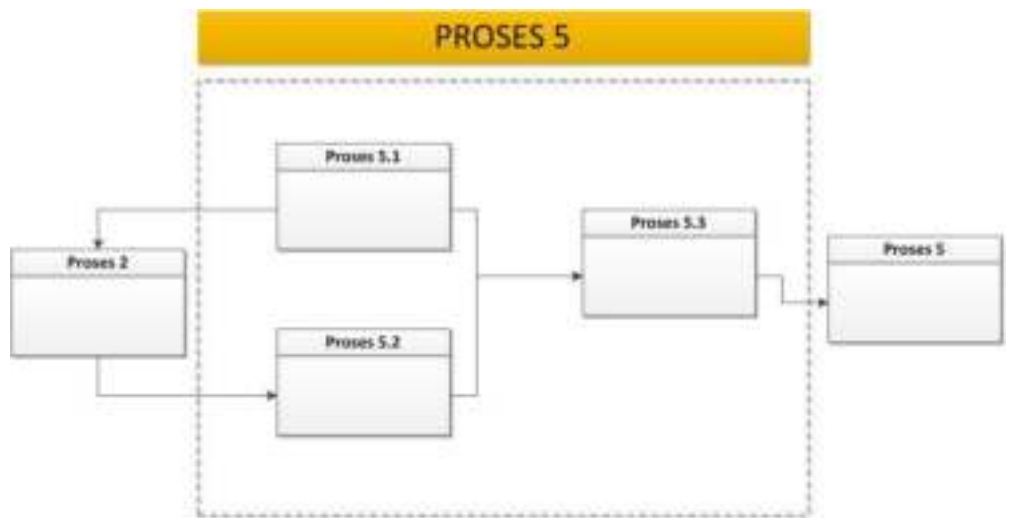
##### 1). Identifikasi peta subproses:

- a) untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-*

*Input- Process-Output Customer (SiPoC).*



- 4). Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- 1) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;

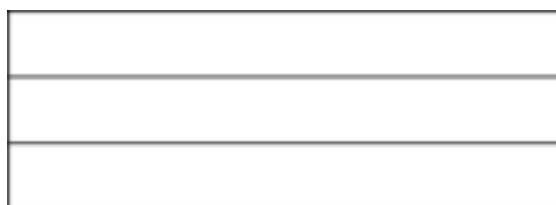
- 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

d. Peta lintas fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles/peran*;



- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

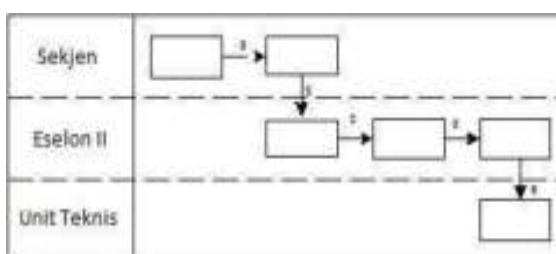
- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing- masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

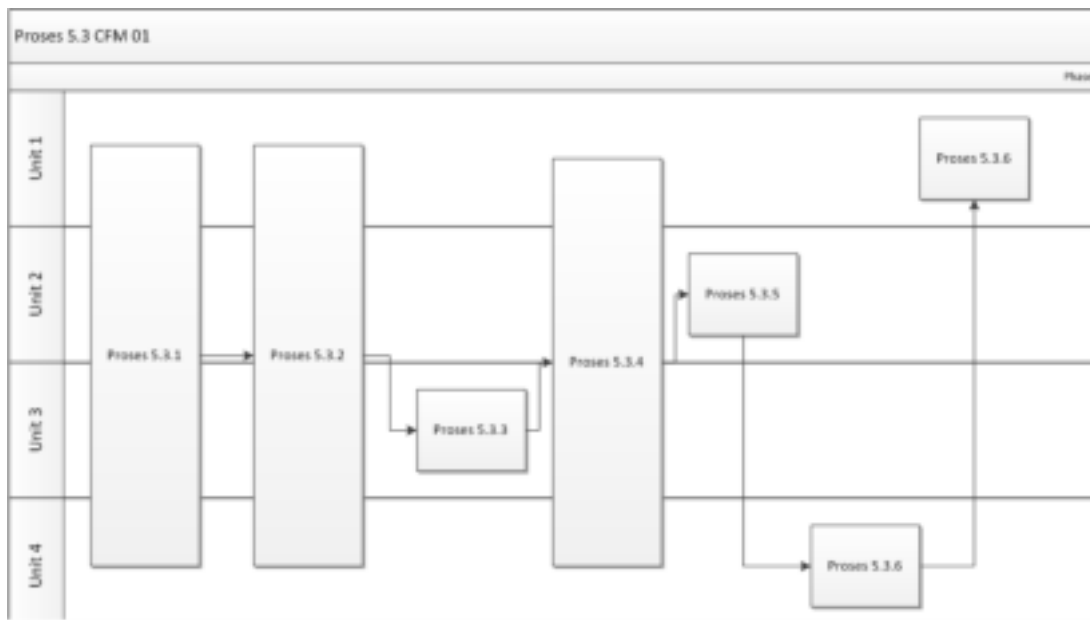
Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis		<input type="text"/>	

beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;





### 3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana.

Penerapan peta proses bisnis meliputi :

#### a. Pengesahan Peta Proses Bisnis

- 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- 2) pimpinan tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

#### b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis

- 1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
- 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

#### c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

- 1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit

organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. Perubahan Peta Proses Bisnis

- 1) perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja (visi, misi, dan sasaran yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah);
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA  
 PROSES BISNIS DI PEMERINTAH KOTA  
 BIMA.

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 PADA RPJMD

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penyusunan dan penyajian peta proses bisnis level 0 dan level 1 RPJMD, disajikan peta proses bisnis RPJMD KOTA BIMA TAHUN 2018-2023 sebagai contoh.



## PROSES BISNIS

**SASARAN 1**

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PELAYANAN KESEHATAN

PENDUKUNG

PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEHATAN

KETERSEDIAAN FARMASI, ALKES DAN SARANA PRASARANA KESEHATAN

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

LEBEL 1

SASARAN 1:

## CROSS CUTTING

### Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,35	69,55	69,75	69,95	70,15	70,35

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; P2KB; Dinas Sosial
	Peningkatan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Dinas Daerah
	Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Dinas Kesehatan
	Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Dukcapil; Dinas P3DT; Bappeda Litbang; Diskominfo
	Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan; Dinas PUPD, S Kecamatan

Pemenuhan Sarpras Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Layanan Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat

Pengembangan Tenaga Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

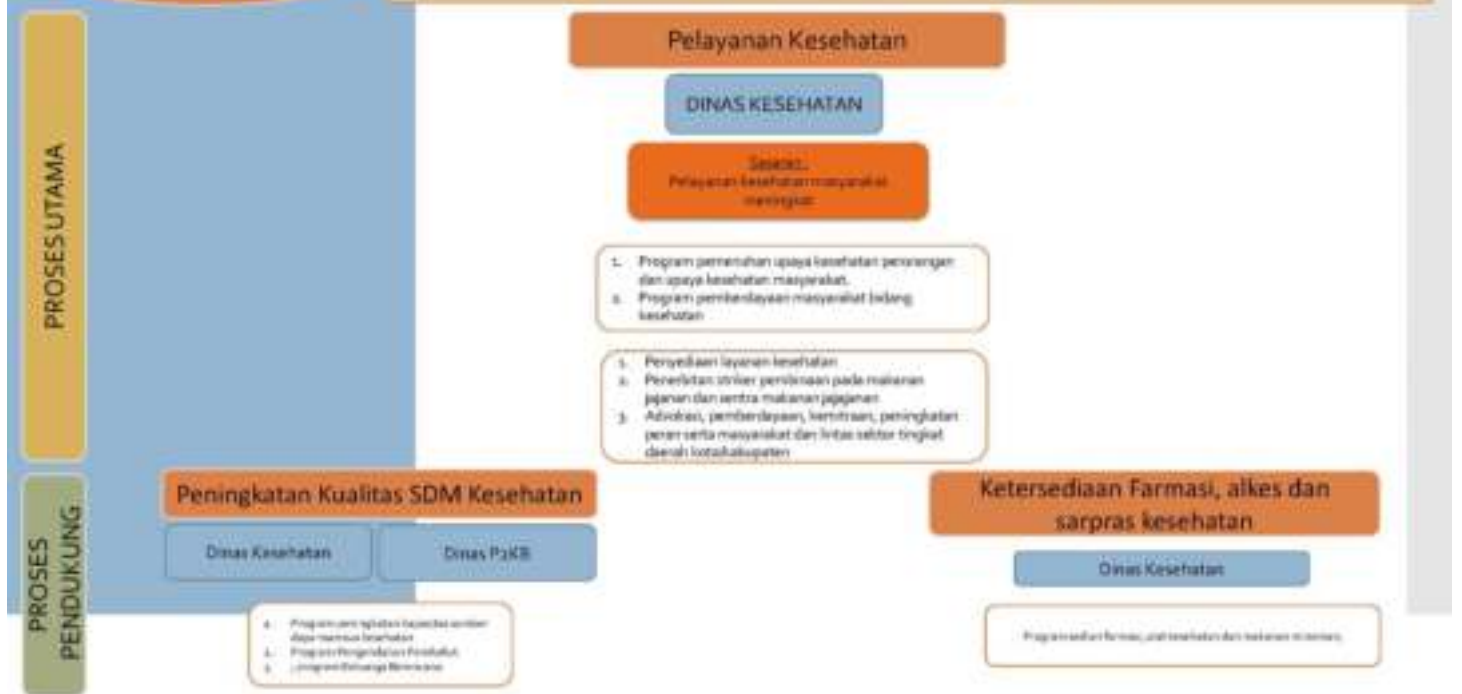
Pengembangan Data dan Sistem Informasi

Regulasi Bidang Kesehatan



**Logframe Sasaran 1**

**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**  
(Indikator : Angka Harapan Hidup)



**PROSES BISNIS**

**SASARAN 2**



## CROSS CUTTING

### Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	98,29%	98,3%	99,29%	99,79%	100%	100%
Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	23,17%	25,17%	27,1%	29,17%	31,17%	33,17%

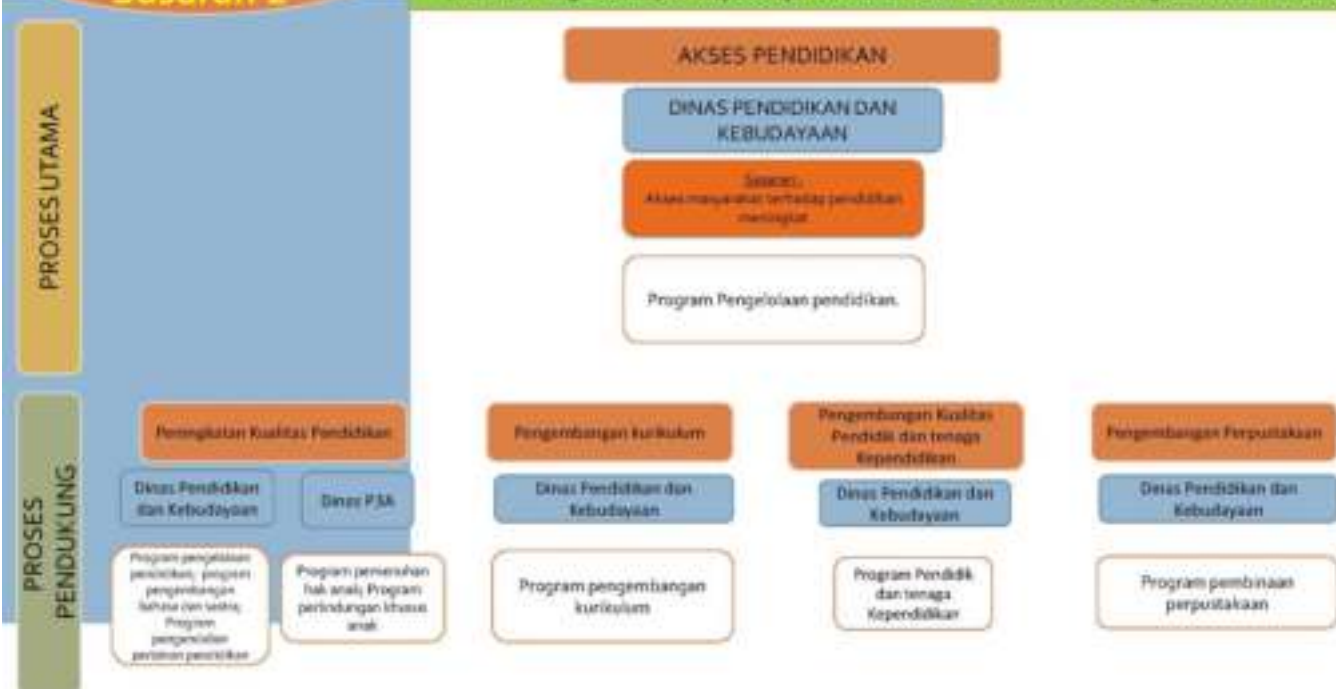
Sasaran Dasar	Aspek	Pengikat Dasar
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Pendidikan SD	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan SMP	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Inklusif	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan ; SP3A, Dasar Sosial
	Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan
	Penerapan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengukuran Data dan Informasi	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan, Dasar Konsep, SP3A, Dasar Sosial, Dasar Tenaga Kerja
	Pengembangan Budaya Literasi	Dasar Perencanaan dan Keuangan
	Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Lanjutan Pendidikan Sertifikasi	Dasar Pendidikan dan Kebudayaan ; Dasar Perencanaan dan Keuangan, Dasar Tenaga Kerja



### Logframe Sasaran 2

### Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

(Indikator : Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan)



# PROSES BISNIS

**SASARAN 3**

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PENGUATAN EKONOMI

PENDUKUNG

PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU

STABILISASI HARGA

LEBEL 1

MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT

SASARAN 3:

## CROSS CUTTING

### Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pengembangan Wirausaha Baru

Penguatan Ekonomi

Stabilitas Harga

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Pengeluaran Per Kapita (Rp.000/bln)	1.250	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah 2019 - 2020	Perangkat Daerah 2021-2023
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Penguatan ekonomi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan&perikanan; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan&perikanan; dan Dinas Tenaga Kerja
		Pengembangan wirausaha baru	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas PIA; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas PIA; dan Dinas Tenaga Kerja
		Stabilitas Harga	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; dan Dinas Tenaga Kerja

**Logframe Sasaran 3**

**Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

(Indikator : Pengeluaran Per Kapita)

**PENGUATAN EKONOMI**

DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

Sasaran:  
Kualitas belajar masyarakat meningkat

1. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
2. Program pembastayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.
3. Program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Program peningkatan dan pembangunan.

PROSES UTAMA

PROSES PENDUKUNG

**Pengembangan wirausaha baru**

Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan  
Perdagangan

Dinas PjA

Program pembastayaan usaha menengah, kecil dan mikro, program pengembangan UKM, program pendirian dan latihan perkerasaaan

Program pengastanaan gender dan pembastayaan perempuan

**Stabilitas Harga**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan

Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

**PROSES BISNIS**

**SASARAN 4**

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PENANGANAN KERAWAHAN PANGAN

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

LEBEL 1

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN 4:

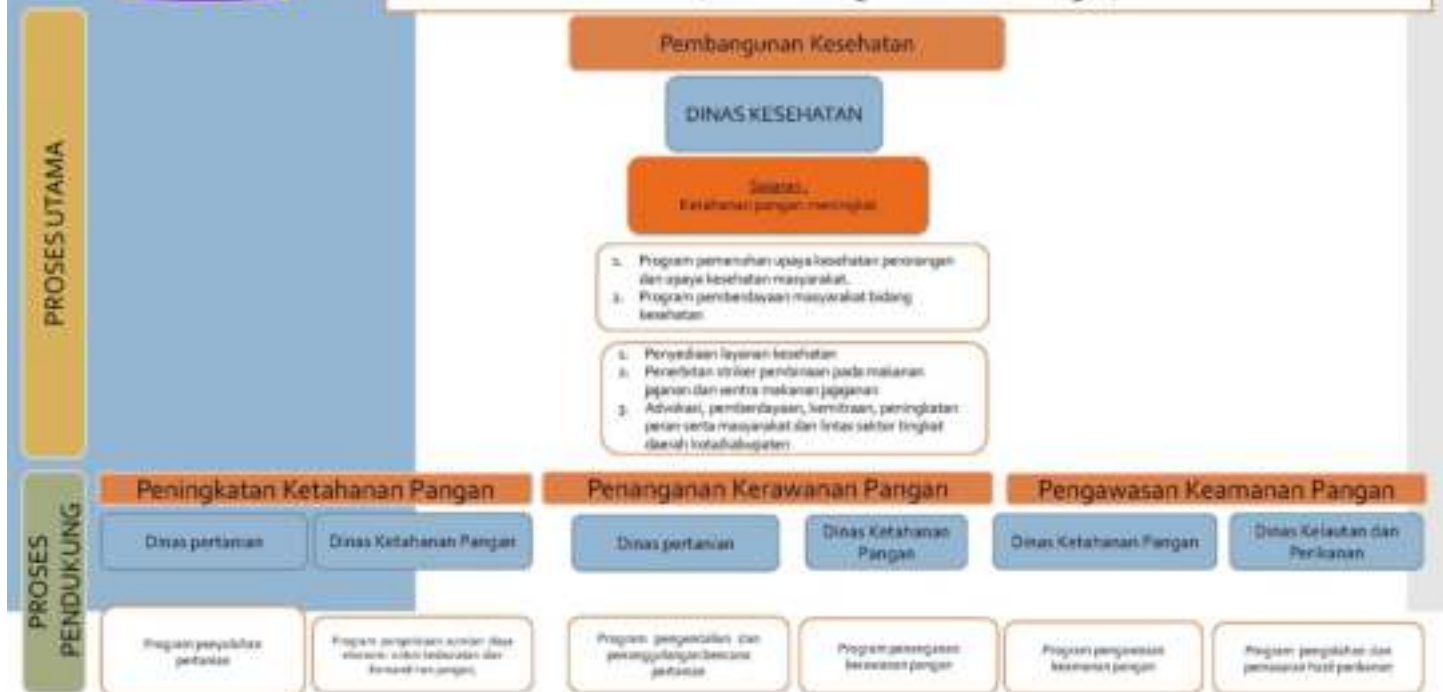
Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka ketahanan pangan	80,9	83,3	84,3	85,1	86,3	87,3
Sasaran Daerah	Aspek	Penanggung Jawab				
Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian;				
	Promosi Pola Konsumsi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan				
	Pengaturan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi;				
	Pembiayaan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Kesehatan				
	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Koperasi; Dinas Tenaga Kerja; DP3A; DP3B; Badan Usaha 5 Kecamatan				



Logframe Sasaran 4

Meningkatnya Ketahanan Pangan  
(Indikator : Angka Ketahanan Pangan)



# PROSES BISNIS

**SASARAN 5**

**LEBEL 1**

**PROSES 2 (EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN)**

**MANAJEMEN**

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

**UTAMA**

PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR JASA PARIWISATA

**PENDUKUNG**

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

STABILITAS KEAMANAN

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

**SASARAN 5:**

## CROSS CUTTING

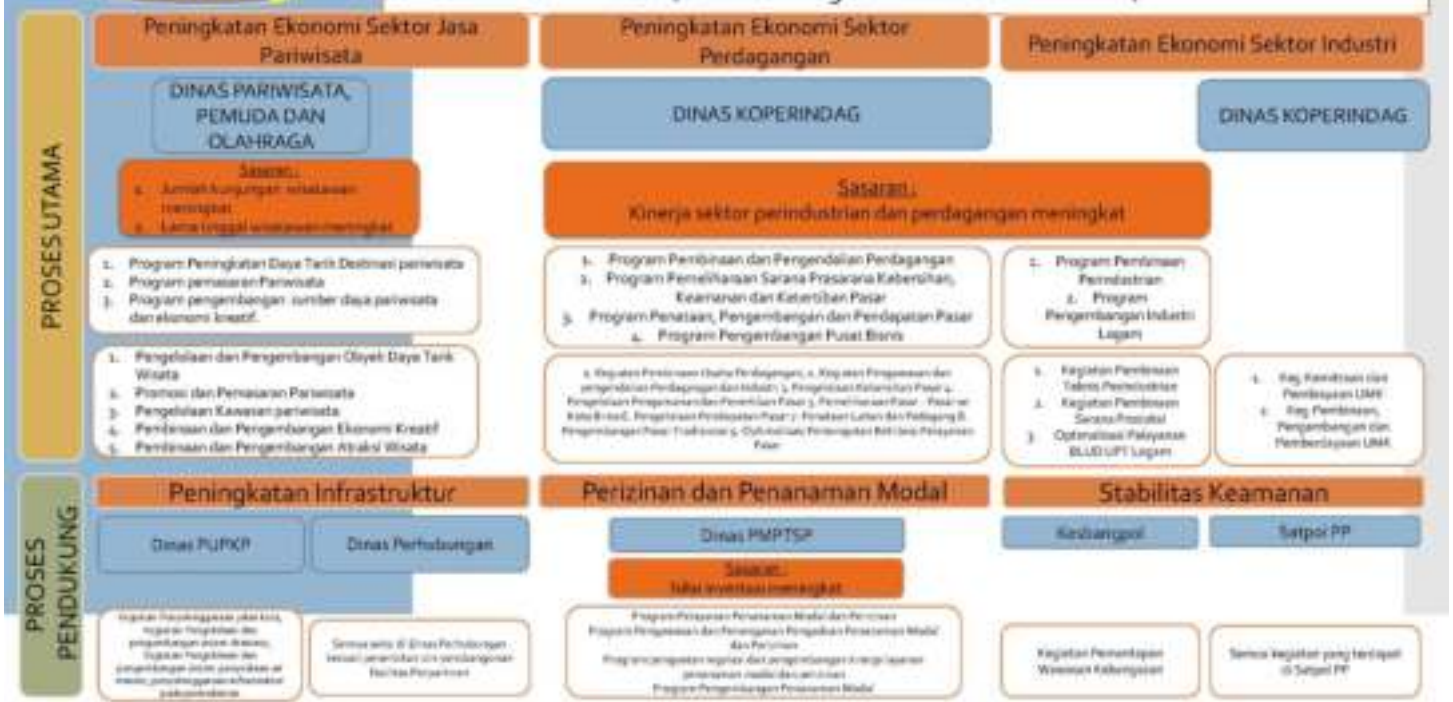
### Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi



Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	5,8	3	3,3	3,6	3,9
<b>Sasaran Umum</b>	<b>Angka</b>		<b>Perangkat Daerah</b>			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa Pariwisata		Dasar Pariwisata, Dasar Kebudayaan,			
	Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan		Dasar Kiperdagang			
	Peningkatan Ekonomi Sektor Industri		Dasar Kiperdagang			
	Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanian		Dasar Pertanian			
	Peningkatan Ekonomi sektor Perikanan		Dasar Kelautan dan Perikanan			
	Peningkatan Infrastruktur		Dasar PUPR, Dasar Perumahan, DLH			
	Perizinan dan Penanaman Modal		Dasar Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dasar PUPR			
	Stabilitas Keamanan		Badan Keamanan Bangsa dan Politik; Sistem Pemerintahan Prodi			

# Logframe Sasaran 5

## Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi (Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi)



## PROSES BISNIS

### SASARAN 6

LEBEL 1



## CROSS CUTTING

### Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Kemiskinan (%)	8,79	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2
Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah				
Kemiskinan masyarakat menengah	Perbedaan Sosial	Dinas Sosial				
	Jamuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Jamuan Kesehatan	Dinas Kesehatan				
	Inyeksi Sektor Perikanan	Dinas PUP, Dinas PUP, Dinas Kesehatan				
	Peningkatan Pendapatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Programas Desa dan Kelurahan	Dinas Disabilitas, Dinas Kesehatan, Bappeda Letheng, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi				
Programas TKK	Bappeda, T. Kecamatan					

Peningkatan kesejahteraan keluarga

Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar

Perlindungan dan jaminan sosial

Pembudayaan sosial masyarakat

### Logframe Sasaran 6

### Mnurunnya Angka Kemiskinan (Indikator : Angka Kemiskinan)

PROSES UTAMA

AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP KEBUTUHAN DASAR

DINAS SOSIAL

Sasaran:

Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar meningkat dan memperluas peranganan PMKS

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program Rehabilitas sosial,

PROSES PENDUKUNG

Peningkatan kesejahteraan keluarga

Dinas Peningkatan Penduduk dan KB

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KES)

Pembudayaan sosial masyarakat

Dinas Sosial

Rekamater

Program pemberdayaan sosial

Program pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera

Perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial

Dinas Peningkatan Penduduk dan KB

Program perlindungan dan jaminan sosial

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera



## PROSES BISNIS

**SASARAN 7**

PROSES 2 (EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PENINGKATAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN WIRAUSAHA BARU MANDIRI

PENDUKUNG

PENYEDIAAN TENAGA KERJA TERAMPIL

PENINGKATAN AKSES PERMODALAN

LEBEL 1

MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA

SASARAN 7:

## CROSS CUTTING

### Sasaran 7 : Meningkatnya Kesempatan Kerja

Penyediaan tenaga kerja terampil

Peningkatan angkatan kerja dan wirausaha baru

Peningkatan akses permodalan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,39	4,5	4	3,85	3,7	3,55

Sasaran Desral	Aspek	Pemerintah Desral
Meningkatnya kesempatan kerja	Perbaikan kesempatan kerja	Disas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kependudukan, Dinas P2MB, DP3A
	Peningkatan ketrajangalan angkatan kerja	Disas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DP3A, DP3RB
	Perlebangan tenaga kerja	Disas Tenaga Kerja
	Pengkatan Data dan Informasi	Disas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Dilicapi, Dinas Kesehatan

**Logframe Sasaran 7**

**Meningkatnya Kesempatan Kerja**

(Indikator : Tingkat Pengangguran)



**PROSES BISNIS**

**SASARAN 8**



## Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Nilai SAKIP	8 (83,34)	8 (83,38)	88 (79,01)	88 (79,06)	88 (79,06)	8 (80,01)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,14	84	85	86	87	88

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Inspektoran, BPKAD, Bappeda Litbang, Diskominfo, Bagian AP, Bagian APP, Bagian LPIB, Bagian Organisasi, Sekretariat Utama OPD
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD, Dinas PKP, Bagian Umum Setda, Sekretariat Utama OPD
	Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Peningkatan Organisasi dan Tatakelola	Bagian Organisasi
	Peningkatan Pengawasan	Inspektoran Daerah
	Pendataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum, Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dinas Disdik, Dinas Kearsipan, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Kepariwisata, Bappeda Litbang
	Peningkatan Inovasi	Bappeda Litbang
	Pengembangan E-Gov	Dinas Kearsipan
	Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### Logframe Sasaran 8

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah)

PERANGKAT DAERAH UTAMA	PERINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	PERINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET	MANAJEMEN ASN	MANAJEMEN ORGANISASI DAN TATAKELOLA	PENGUATAN PENGAWASAN	PERATAAN PERATURAN PER-UDAHAN	PERINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
	BAPPEDA LITBANG INSPKOTAK I SAC ADM PER	OPKAD	BKSDM BAG ORGANISASI	INSPEKTORAT	BAG HUKUM SRT DPRD	DINWAL GERSAPIL DINWAL YONWOTIF SAC INDIKATOR	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan pengembangan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan keuangan daerah, program pengendalian tingkat inflasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>
	BKSDM DPKAD	BAG YLEMBANG				BAG UMUM BAG PROTOKOL SAC DAN/TA II	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Selaku fungsi pelayanan publik dan peningkatan kinerja</li> <li>Program peningkatan dan reformasi pemerintahan daerah</li> </ul>	
PD PENDUKUNG	PENGUATAN INOVASI BAPPEDA LITBANG	PENGEMBANGAN E-GOV DINAS KOMINFOTIK	MANAJEMEN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN				
	Program penelitian dan pengembangan	Program aplikasi informasi	Program peningkatan pengelolaan kearsipan, Program peningkatan pengelolaan kearsipan, Reformasi kearsipan				

## CROSS CUTTING

### Sasaran 9 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan (Rp)	5,34	5,7	5,72	5,82	5,92	6,02
Sasaran Daerah	Aspek		Perangkat Daerah			
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Tenaga Kerja		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan anggota Koperasi dan melalui UMKM		Dinas Koperasi			
	Peningkatan produktivitas petani dan nelayan		Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Pembudayaan Masyarakat		Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DPJA, DP2KB, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat, Dinas PUPR			
	Peningkatan eresia		DPMPSP, Bagian Ekstensi Setda, Bag AP Setda			



## CROSS CUTTING

### Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Rata-rata Skor IKM	83,44	84	85	86	87	88
Sasaran Daerah	Aspek		Perangkat Daerah			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan PdM		Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas DPMPSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Kajian, Sekretariat			
	Peningkatan Inovasi		Bappenas Litbang, Bagian Organisasi			
	Peningkatan E-Gov		Dinas Kesehatan			



## PROSES BISNIS

SASARAN 11

PROSES 4 (INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PENINGKATAN KETAATAN TERHADAP TATA RUANG

PENDUKUNG

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

LEBEL 1

MENINGKATKAN KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG

SASARAN 11

## CROSS CUTTING

### Sasaran 11 : Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang

Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Penguatan Sistem Informasi Geospasial

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan Tata Ruang

Pengawasan Tata Ruang

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	85	85	88,1	88,2	88,7	88,9

Sasaran Bawah	Aspek	Penyakit Bawah
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Disus PUPR
	Pelaksanaan Tata Ruang	Disus PUPR, Disus PNF, DPMPDSP, Disus Lingkungan Hidup
	Pengawasan Tata Ruang	Disus PUPR, DPMPDSP, Setpel PP, Disus Lingkungan Hidup
	Penguatan Sistem Informasi Geospasial	Disus PUPR, Bappeda Litbang

**Logframe  
Sasaran 11**

**MENINGKATNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG**  
(Indikator : Persentase Kesesuaian Tata Ruang)



Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian  
Pencemaran Air  
dan Udara

Kualitas  
Lingkungan  
Hidup

Pengelolaan  
Ruang Terbuka  
Hijau

Pemberdayaan  
Masyarakat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,41	80	84	83	86	87

Sasaran Daerah	Aspek	Pemangku Daerah
Kualitas lingkungan lebih meningkat	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR; Dinas Perkebunan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR
	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan; Kecamatan; Dinas PUPR; Dinas Lingkungan Hidup

Logframe  
Sasaran 12

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  
(Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)



# PROSES BISNIS

**SASARAN 13**

LEB. 1

PROSES 4 (INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

PENDUKUNG

PARTISIPASI MASYARAKAT

SASARAN 13: KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH MENINGKAT

## CROSS CUTTING

### Sasaran 13 : Kualitas Infrastruktur Daerah Meningkat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Infrastruktur Wilayah (%)	31,15	38,81	40	41	42	43
Sasaran Daerah	Aspek			Pencapaian Daerah		
Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum			Dinas PUP, Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan Infrastruktur Perumahan			Dinas PUP, Dinas PSP		
	Peningkatan Infrastruktur Perhubungan			Dinas Perhubungan		
	Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan			BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
	Partisipasi Masyarakat			3 Kecamatan		

Infrastruktur Wilayah/Daerah

Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Peningkatan Infrastruktur Perhubungan

Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan



**Logframe  
Sasaran 13**

**MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH**

(Indikator : Indeks Infrastruktur Wilayah)



**PROSES BISNIS**

**SASARAN 14**



## CROSS CUTTING

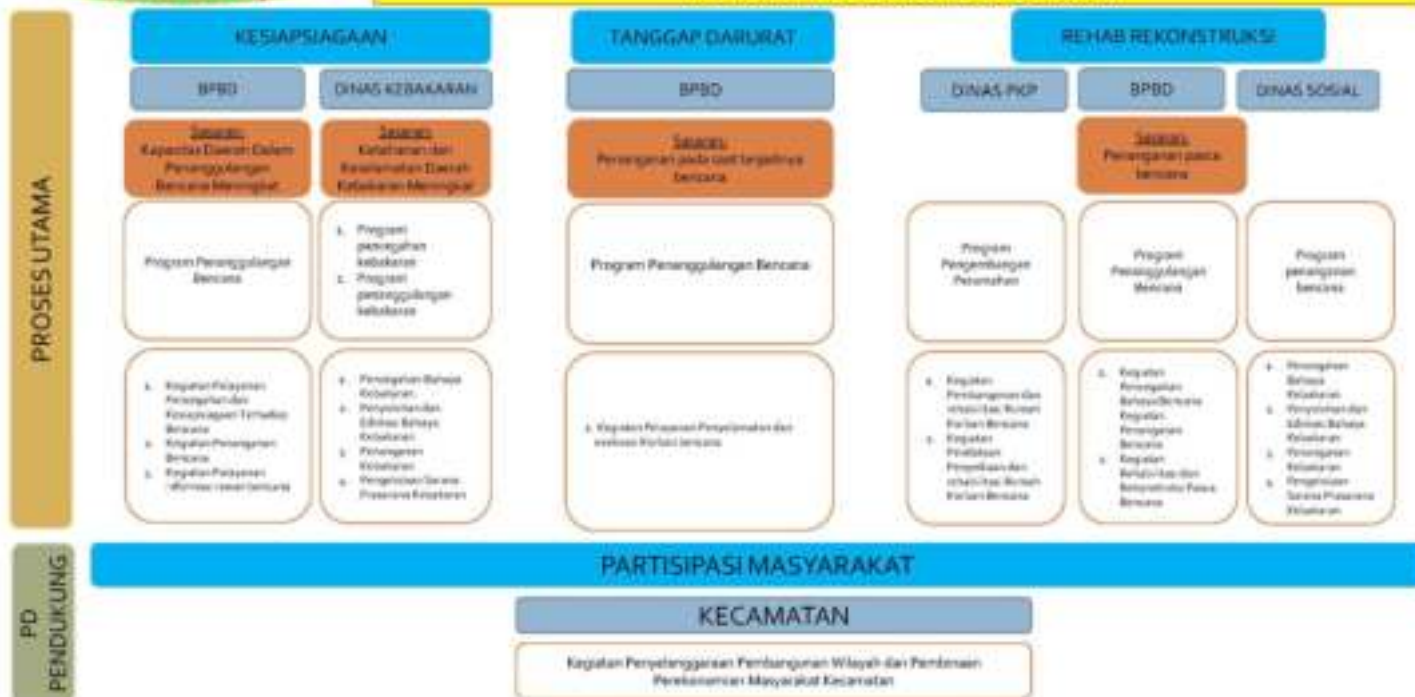
### Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Ketahanan Bencana	83	84	85	86	87	88
Sasaran Daerah	Aspek		Perangkat Daerah			
Ketahanan terhadap bencana meningkat	Ketahanan terhadap bencana		BPBD; Satuan Pol PP.			
	Kesiapsiagaan		BPBD; Satuan Pol PP.			
	Tanggap Darurat		BPBD; Satuan Pol PP; Dinas Sosial			
	Rehab rekon		BPBD; Satuan Pol PP; Dinas Sosial			
	Partisipasi Masyarakat		Kecamatan			



### Logframe Sasaran 14

## MENINGKATNYA KETAHANAN TERHADAP BENCANA (Indikator : Indeks Ketahanan Bencana)



# PROSES BISNIS

**SASARAN 15**

**PROSES 5 (AMAN DAN TENTERAM)**

**MANAJEMEN**

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

**UTAMA**

PREVENTIF  
(Upaya Pencegahan)

REPRESIF  
(Upaya Penindakan)

**PENDUKUNG**

KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

MENINGKATKANNYA KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

**LEBEL 1**

**SASARAN 15:**

## Sasaran 15 : Meningkatkan Keamanan, Ketenteraman dan ketertiban

### CROSS CUTTING

Upaya Pencegahan (Preventif)

**Ketenteraman & Ketertiban**

Upaya Penindakan (Represif)

Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Kriminalitas (%)	20	25	30	35	40	45
Persentase penurunan angka konflik sosial (%)	11,2	12,5	14,3	16,7	20	25

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satpol PP ; Badan Kesbangpol; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Sosial ; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; Bag. Kesra; Kecamatan
	Upaya Penindakan (Represif)	Satpol PP
	Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol ; Kecamatan

# Logframe Sasaran 15

## Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (Indikator : Angka Kriminalitas & Persentase penurunan angka konflik sosial)



# CROSS CUTTING

## Sasaran 16 : Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Pendidikan Muatan Lokal

Penguatan Budaya Lokal

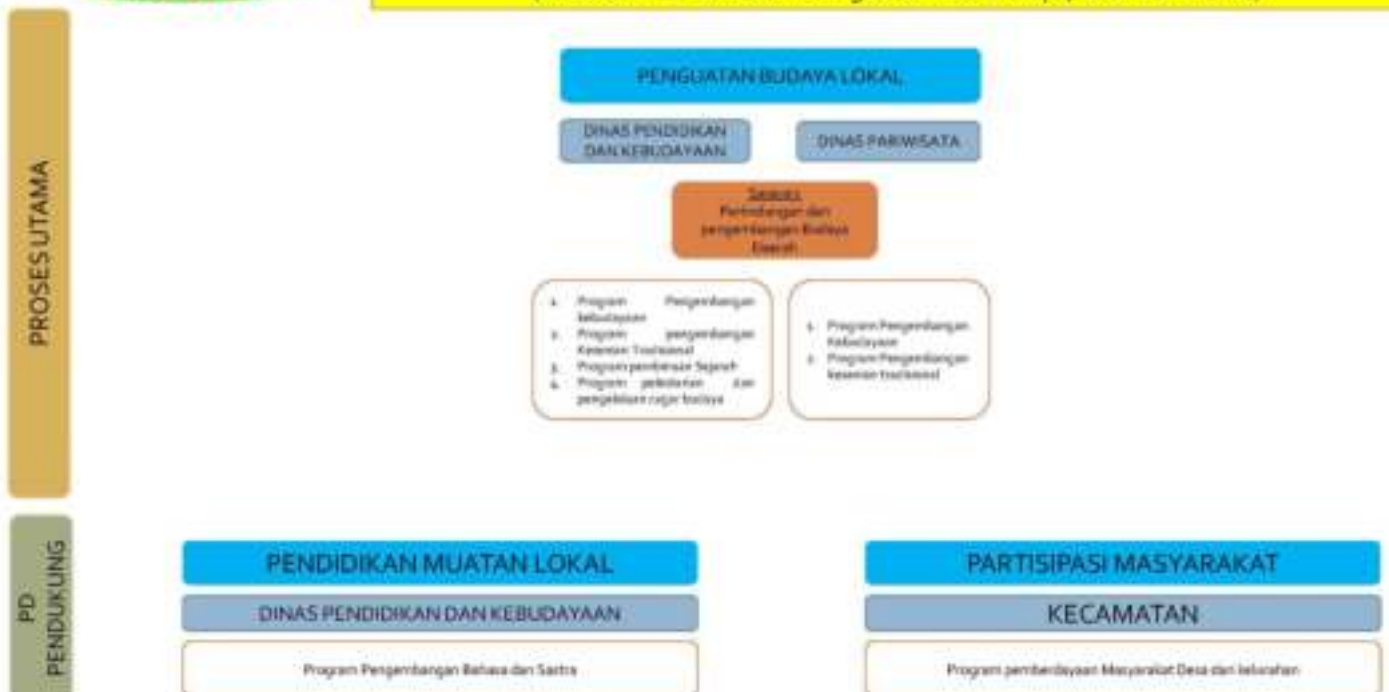
Partisipasi Masyarakat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Persentase Peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi (%)	1,1	2,1	3,2	4,2	5,3	6,3

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Penguatan Budaya Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Pariwisata
	Pendidikan Muatan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
	Partisipasi masyarakat	Kecamatan

### Logframe Sasaran 16

#### MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA LOKAL (Indikator : Persentase Peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi)



# PROSES BISNIS

**SASARAN 17**

**PROSES 5 (AMAN DAN TENTERAM)**

**MANAJEMEN**

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

**UTAMA**

PENINGKATAN KEBEBASAN BERAGAMA

**PENDUKUNG**

PENGAMALAN AJARAN AGAMA

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

MENINGKATKAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

**SASARAN 17:**

**LEBEL 1**

## CROSS CUTTING

### Sasaran 17 : Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama

Peningkatan Kebebasan Beragama

Kehidupan Beragama

Pengamalan Ajaran Beragama

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Indikator	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Indeks kerukunan umat beragama	83	84	85	86	87	88

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Peningkatan Kebebasan Beragama	Bag. Kesra
	Pengamalan Ajaran Beragama	Bakesbangpol; Bag. Kesra
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Bakesbangpol; Bag. Kesra; Kecamatan

**Logframe**  
**Sasaran 17**

**Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama**  
(Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama)

**PENINGKATAN KEBEBASAN BERAGAMA**

**BAG. KESRA**

Spesifikasi  
Masyarakat dan Lembaga  
Keagamaan

Program Pemerintahan dan  
Keagamaan Rakyat

Legowo - Fasilitas  
pengabdian dan Mental  
Spiritual

**PENGAMALAN AJARAN BERAGAMA**

**SAGIAN KESRA**

**BAKESBANGPOL**

Program pemerintahan dan  
Keagamaan Rakyat

Program Pembinaan dan  
Pengembangan Sarafan  
Umat, Sosial dan Budaya

**PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**KECAMATAN**

Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA  
PROSES BISNIS DI PEMERINTAH KOTA BIMA

PENYAJIAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

**BAB I PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

Menjelaskan tentang uraian pentingnya setiap unit organisasi menyusun peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi dan digambarkan sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana strategis organisasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menjelaskan maksud penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah sebagai acuan bagi setiap Bidang, seksi, dan sub bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menjelaskan tujuan penyusunan peta proses bisnis seperti sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan



ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

### III. RUANG LINGKUP

Menjelaskan ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

## BAB II TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Menjelaskan kaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan Visi Misi Daerah serta menjabarkan uraian tugas pokok dan fungsi organisasi seperti contoh berikut ini.

VISI				
”MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI”				
MISI:				
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS DAN RAMAH, MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Indeks ketahanan daerah	1 Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	1 Peningkatan kemandirian masyarakat	1	Pembentukan dan Pengembangan kelurahan tangguh
			2	Pembentukan Sekolah aman bencana dan fasilitas umum lainnya
		2 Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan dengan Mengembangkan kearifan lokal	1	Pengembangan budaya sadar bencana
			2	Integrasi Program dengan SKPD terkait
			3	Integrasi Perencanaan dengan RTRW

			untuk adaptasi bencana	
		3	Peningkatan Profesionalisme SDM	1 Diklat dan Penyuluhan bagi Tim PB
				2 Sertifikasi SDM
		4	Peningkatan Sistim Informasi rawan bencana	1 Pengembangan sistim peringatan dini
				2 Penyusunan Peta rawan bencana
				3 Penyebarluasan informasi potensi bencana
2	Persentase wilayah yang telah diintervensi upaya pencegahan krisis air	1	Pengembangan wilayah mitigasi struktural	1 Pembuatan Sumur Resapan
				2 Pengelolaan air hujan sebagai alternatif air bersih
3	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	1	Peningkatan sistim tatakelola logistik dan peralatan yang memadai	1 Meningkatkan manajemen Logistik dan Peralatan
				2 Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kedaruratan bencana sesuai standar minimal
		2	Pembangunan sistim penanganan darurat secara cepat , efektif dan efisien	1 Penyusunan Rencana kontigensi
				2 Pengembangan pusdalops
				3 Uji Renkon dengan Gladi tanggap darurat secara berkala
4	Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana	1	Peningkatan koordinasi RR pasca bencana	1 Penyusunan Rencana aksi Rehab dan Rekon
				2 Peningkatan Koordinasi Pemulihan RR lintas sektor (Dinas terkait, BNPB, Kementerian terkait)
				3 Pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana

Sumber:

Uraian tugas pokok dan fungsi disusun berdasarkan Peraturan Walikota Bima yang mengatur tentang struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

### **BAB III PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah yang antara lain adalah:

1. **Definitif**, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. **Urutan**, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. **Pelanggan atau pengguna layanan**, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. **Nilai tambah**, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. **Keterkaitan**, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. **Fungsi silang**, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. **Sederhana representatif**, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. **Konsensus subjektif**, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

### **BAB IV TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

Menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas/aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses

kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

## 2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya).

## 3. Permasalahan Perangkat Daerah

### **BAB V HASIL PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

Menjelaskan hasil penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah.

### **BAB VI PENUTUP**

Uraian penutup

